

**KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN ATURAN LALU LINTAS DALAM PEMBAYARAN
PAJAK SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN DITINJAU DARI
PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

(STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRES KOTA MALANG)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat untuk Memeroleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya
Karya Malang**



Disusun Oleh:

Marvin Jordan Hartomoro

NIM 201541025

Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Widya Karya Malang

2019

PERSETUJUAN SKRIPSI

KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN ATURAN LALU LINTAS DALAM PEMBAYARAN
PAJAK SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN DITINJAU DARI PASAL
70 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRES KOTA MALANG)

Diajukan oleh:

Marvin Jordan Hartomoro

NIM 201541025

Telah disetujui Dosen Pembimbing

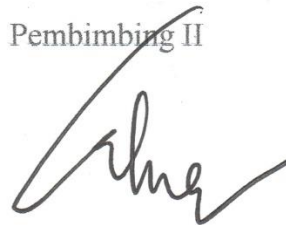
Di Malang pada tanggal 21 Juni 2019

Pembimbing I



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum
NIK. 198707110007

Pembimbing II



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum
NIK. 200409210042

Mengetahui
Dekan



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum
NIK. 200409210042

Menyetujui
Ka. Bid. Ilmu Hukum



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum
NIK. 198707110007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

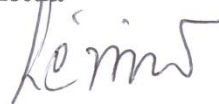
Fakultas Hukum Funiversita Katolik Widya Karya Malang

Pada 4 Juli 2019

dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua



Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum
NIK:199105210020

Penguji I



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum
NIK:198707110007

Penguji II



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum
NIK:200409210042

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Unika Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum
NIK:200409210042

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marvin Jordan Hartomoro

Nim : 201541025

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 22 Juni 2019

Yang menyatakan,

Marvin Jordan Hartomoro

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Marvin Jordan Hartomoro
NIM : 201512025
Universitas : Universitas Katolik Widya Karya Malang
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 3 Juli 1997
Alamat : Perum. Griya Indah Agus Salim Blok F-8
RT 002/001 Giri, Banyuwangi
Nama Orang Tua : Lucky Hartomoro(Ayah)
Sri Ngetamina (Ibu)
Riwayat Pendidikan :
1. Tahun 2009 : Lulus SDK Santa Maria Banyuwangi
2. Tahun 2012 : Lulus SMPK Santo Yusuf Banyuwangi
3. Tahun 2015 : Lulus SMAK Hikmah Mandala Banyuwangi
4. Tahun 2015 : Terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Katolik
Widya Karya Malang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul **Kewenangan Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Dalam Pembayaran Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Ditinjau Dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Satlantas Polres Kota Malang)**

Skripsi ini merupakan tugas akhir jenjang strata satu yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan juga selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar memberi masukan dan saran hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
2. Bapak Hermanto Silalahi, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dengan baik selama proses penyelesaian skripsi.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

3. Segenap bapak dan ibu dosen serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah banyak memberikan bimbingan, pengajaran, dan pengarahan setudi kepada penulis
4. Pemberi Beasiswa PSP yang telah banyak memberikan bantuan dana kuliah kepada penulis.
5. Bapak Muhamad Syaikhu, S.H dan seluruh staff di Polresta Malang kota yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan informasi yang dibutuhkan selama proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak Safari Selaku Kepala Satlantas Polres Kota Malang yang telah memberikan pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan selama proses penyelesaian skripsi.
7. Keluarga penulis yang tercinta, baik yang ada di Banyuwangi, Lumajang, Malang, dan di manapun berada yang tidak pernah lelah untuk memberikan dukungan dan motivasi baik secara moril maupun material kepada penulis.
8. Teman-teman hebat Fakultas Hukum Angkatan 2015 yang mau berjuang dan berproses bersama, hingga membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi.
9. Alverina Twistya, teman seperjuangan yang terus gigih berjuang sebagai mahasiswa tingkat akhir dan tidak pernah menyerah untuk memarahi saya yang malas.
10. Arie Leonario Rikin, sahabat luar biasa yang mendukung dari awal masuk kuliah hingga saat ini terutama saat proses pengerjaan Skripsi.
11. Teman-teman Artcrew, suatu organisasi yang membuat saya berkembang dan wadah dimana saya menemukan banyak inspirasi.

12. Teman-teman fakultas hukum angkatan 2016 dan 2017 yang menyemangati saya dan mendukung skripsi saya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, berbagai saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang berguna bagi penulis maupun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, 22 Juni 2019



Penulis

ABSTRAK

- A. Nama : Marvin Jordan Hartomoro
B. Nim : 201541025
C. Judul Penelitian : **Kewenangan Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Hukum Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Dalam Pembayaran Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Ditinjau Dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Satlantas Polres Kota Malang)**
D. Kata Kunci : Kewenangan, Polisi Lalu Lintas, Pajak Kendaraan Bermotor
E. Daftar Acuan : 11 Buku (1983-2016) dan 5 Peraturan (2002-2012)
F. Ringkasan

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat sebagai bentuk akibat dari pertumbuhan ekonomi di perkotaan membawa implikasi lain yakni menunggaknya pajak kendaraan yang semakin parah di Kota Malang. Masalah ini menjadi salah satu bentuk permasalahan yang masih sulit untuk di pecahkan oleh para pengambil kebijakan di perkotaan. Meningkatnya angka tunggakan pajak ini terjadi di beberapa kota yang menjadi tujuan masyarakat untuk memperoleh ekonomi yang lebih baik atau bahkan dengan tujuan lain seperti pendidikan.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kewenangan Polantas dalam menegakan hukum terhadap wajib pajak yang belum mendaftarkan ulang surat tanda nomor kendaraannya di Kota Malang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari narasumber dan data sekunder diperoleh dari teori, Undang-undang

Hasil dari penelitian adalah Kepolisian Lalulintas mempunyai wewenang penuh untuk melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terlambat membayarkan pajak karena penegakan itu dilakukan tidak harus pada saat operasi saja, penilangan bisa dilakukan oleh polisi setiap hari. Polisi tidak pernah melakukan operasi penilangan mengenai keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun STNK mati tetapi polisi menilang karena belum melakukan pengesahan STNK. Yang banyak dimengerti oleh wajib pajak adalah polisi menilang karena keterlambatan, namun pihak polisi lalulintas menilang karena belum melakukan pengesahan STNK. Hal ini yang menyebabkan banyak terjadi pro dan kontra antara wajib pajak dan kepolisian lalulintas atau atar wajib pajak.

G. 2019

ABSTRACT

- A. Name : *Marvin Jordan Hartomoro*
B. Nim : *201541025*
C. Title Of Legal Research : ***Policy Authority Of Traffic Against Activities Of Violation Of Traffic Rules In Tax Payments Of Vehicle Tax Number Reviewed From Article 70 Law Number 22 Of 2009 Concerning Traffic And Road Transport (Case Study In The Malang City Police Resort Satlantas)***
D. Keyword : *Authority, Traffic Police, Vehicle Tax*
E. Reference List : *11 Books (1983-2016) and 5 Rules (2001-2012)*

F. Summary

The growth in the number of vehicles that continues to increase as a result of economic growth in urban areas has other implications, namely the delays in increasingly severe vehicle taxes in Malang City. This problem is one form of problem that is still difficult to solve by urban policy makers. The increasing number of tax arrears occurred in several cities that became the goal of the community to obtain a better economy or even with other objectives such as education. This research was conducted to describe and analyze the authority of the National Police in enforcing the law against taxpayers who have not re-registered their vehicle registration letters in Malang City.

The type of research used is empirical juridical research. The approach method used is a qualitative approach. The source of primary data is obtained directly from the sources and secondary data is obtained from theory, law

The results of the study were that the Traffic Police had full authority to enforce the law against taxpayers who were late in paying taxes because the enforcement was done not necessarily at the time of the operation, the redemption could be carried out by the police every day. The police have never carried out a demolition operation regarding the late payment of motor vehicle tax or vehicle registration, but the police said that they had not yet approved the vehicle registration. What many taxpayers understand is that the police have issued a ticket due to delay, but the traffic police said that they had not yet approved the vehicle registration. This causes a lot of pros and cons between taxpayers and traffic police or taxpayers

G. 2019.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	8
1.5.3 Sumber Data.....	8
1.5.3.2 Sumber Data Sekunder.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	8
1.5.5 Analisis Sumber Data	9
1.6 Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan	11
2.1.1 Peraturan Yang Mengatur Pembayaran Pajak Kendaraan.....	11
2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor	13
2.1.3 Satlantas Polri Kota Malang Sebagai Penegak Hukum Dalam Bidang Lalu Lintas Kota Malang	16
2.1.4 Penunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan merupakan Wewenang Dinas Terkait	18

2.2 Tinjauan Teori	19
2.2.1 Teori Tujuan Hukum	19
2.2.2 Teori Penegakan Hukum.....	22
2.2.3 Teori Kewenangan.....	26
2.2.4 Penelitian Terdahulu	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	33
3.1 Gambaran Umum Satuan Lalu lintas Polres Malang Kota	33
3.1.1 Fungsi Teknis Operasional.....	33
3.1.2 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor SATLANTAS Polres Malang Kota	36
3.1.3 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Malang Kota.....	36
3.1.4 Visi dan Misi Polisi Lalu Lintas Resort Malang Kota	39
3.1.5 Gambaran Umum Wilayah Hukum Polres Malang Kota.....	40
3.2 Penggunaan Kewenangan Polantas untuk Menegakan Wajib Pajak Bermasalah	43
3.2.1 Kewenangan Polisi Lalu Lintas	43
3.2.2 Analisis Kewenangan Penegak Hukum Terhadap Teori Kewenangan.....	52
3.3 Faktor yang Menjadi Penghambat/Kendala Atas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	53
3.3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum	53
3.3.2 Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Teori Penegakan Hukum.....	58
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63